

Analisis Kinerja Keuangan Berbasis Analisis SWOT pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Nadia Fransiska Dewi^{1*}, Muhammad Taufiq Hidayat²

¹⁻²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: 1222200006@surel.untag-sby.ac.id^{1*}, taufikhidayat@untag-sby.ac.id²

Penulis korespondensi: 1222200006@surel.untag-sby.ac.id¹

Abstract. *This study aims to analyze the financial performance of the East Java Provincial Environmental Agency (DLH) during the 2020–2024 period using financial ratio analysis and a SWOT analysis, strengthened through data triangulation. The financial ratio analysis includes the Regional Original Revenue (PAD) effectiveness ratio, expenditure efficiency ratio, expenditure harmony ratio, and revenue growth ratio. The results indicate that the financial performance of the East Java Provincial DLH is generally in the fairly good category, indicated by a high level of budget effectiveness. However, revenue growth tends to fluctuate, and the expenditure structure is still dominated by operational expenditures, while capital expenditures are relatively low. The SWOT analysis indicates that the DLH has strengths in the form of competent personnel and local government support, but faces weaknesses in the form of limited human resources and a low proportion of capital expenditures. Opportunities arise from increased attention to environmental issues and potential collaboration with the private sector, while threats stem from increasing environmental problems and budget fluctuations. This study recommends increasing institutional capacity, strengthening cross-sector collaboration, and restructuring spending priorities to support sustainable environmental development.*

Keywords: *Environmental Agency; Financial Performance; Financial Ratios; Local Government; SWOT Analysis.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Badan Lingkungan Hidup Provinsi (DLH) Jawa Timur selama periode 2020–2024 dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan analisis SWOT, yang diperkuat melalui triangulasi data. Analisis rasio keuangan meliputi rasio efektivitas Regional Initial Revenue (PAD), rasio efisiensi pengeluaran, rasio harmoni pengeluaran, dan rasio pertumbuhan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan DLH Provinsi Jawa Timur umumnya dalam kategori yang cukup baik, ditunjukkan dengan tingkat efektivitas anggaran yang tinggi. Namun, pertumbuhan pendapatan cenderung berfluktuasi, dan struktur pengeluaran masih didominasi oleh pengeluaran operasional, sedangkan belanja modal relatif rendah. Analisis SWOT menunjukkan bahwa DLH memiliki kekuatan berupa personel yang kompeten dan dukungan pemerintah daerah, namun menghadapi kelemahan berupa sumber daya manusia yang terbatas dan proporsi belanja modal yang rendah. Peluang muncul dari meningkatnya perhatian terhadap masalah lingkungan dan potensi kolaborasi dengan sektor swasta, sementara ancaman berasal dari meningkatnya masalah lingkungan dan fluktuasi anggaran. Studi ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan restrukturisasi prioritas pengeluaran untuk mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Analisis SWOT; Badan Lingkungan; Kinerja Keuangan; Pemerintah Daerah; Rasio Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dari pemerintahan yang baik adalah mengelola keuangan publik secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Manajemen keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif di pemerintah daerah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana strategis untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi warga dan meningkatkan kualitas layanan publik (Sari & Rahmawati, 2021). Seiring meningkatnya kesadaran warga terhadap hak mereka untuk menerima layanan publik berkualitas tinggi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik semakin diperlukan. Fareza Tanjung, 2025).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah salah satu contohnya. Aturan ini menekankan bahwa sangat penting untuk menerapkan penyusunan anggaran berbasis prestasi (atau penyusunan anggaran berbasis kinerja), di mana penggunaan anggaran harus dikaitkan secara langsung dengan capaian kinerja, baik dalam bentuk output maupun outcome. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (Zulkarnain, 2020).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. DLH bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta pelestarian sumber daya alam. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan yang baik, karena keterbatasan anggaran dan ketidakefisienan pengelolaan keuangan dapat menghambat pelaksanaan program lingkungan hidup yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat (Yuliani & Purnamawati, 2025).

Antara tahun 2020 hingga 2024, pengelolaan keuangan DLH Jawa Timur menunjukkan fluktuasi besar baik pada pendapatan maupun pengeluaran. Struktur anggaran cenderung didominasi oleh belanja operasional, sementara belanja modal yang berperan penting dalam investasi lingkungan jangka panjang masih relatif terbatas. Selain itu, pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan fluktuasi yang mengindikasikan belum stabilnya dukungan fiskal terhadap sektor lingkungan hidup. Kondisi tersebut menuntut adanya evaluasi kinerja keuangan yang komprehensif agar pengelolaan anggaran dapat lebih optimal dan berorientasi pada berkelanjutan (Saidah & Hidayat, 2025).

Biasanya, kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai menggunakan analisis rasio keuangan yang mencerminkan efektivitas, efisiensi, harmonisasi pengeluaran, dan pertumbuhan pendapatan. Namun, analisis kuantitatif saja tidak cukup untuk sepenuhnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tambahan berupa analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal organisasi secara lebih mendalam. Kombinasi analisis rasio keuangan dan SWOT diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategi yang lebih komprehensif dan aplikatif (Abadi et al, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024 dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang dipadukan dengan analisis SWOT. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi keuangan DLH, mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi, serta merumuskan strategi peningkatan kinerja keuangan yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode ini juga disebut metode campuran. Pendekatan kuantitatif dimanfaatkan untuk mengukur kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur secara objektif melalui analisis rasio keuangan daerah berdasarkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020–2024, yang mencakup pendapatan, belanja operasional, belanja modal, serta komponen anggaran lainnya. Adapun pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kondisi internal dan eksternal organisasi yang memengaruhi kinerja keuangan melalui analisis SWOT. Data kualitatif diperoleh dari wawancara semi-terstruktur dengan aparatur DLH yang dipilih secara purposive, studi dokumentasi terhadap Renstra, LKjIP, serta dokumen pendukung lainnya, dan studi pustaka yang relevan dengan akuntansi sektor publik dan kinerja keuangan daerah.

Rasio efektivitas pendapatan daerah khusus (PAD), rasio efisiensi pengeluaran, rasio keselarasan pengeluaran, dan rasio pertumbuhan pendapatan dihitung menggunakan analisis data kuantitatif untuk menilai kemampuan DLH dalam merealisasikan pendapatan, mengelola pengeluaran, dan mempertahankan keseimbangan struktur anggaran. Hasil analisis rasio tersebut diinterpretasikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam regulasi dan literatur terkait. Sementara itu, analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi DLH Provinsi Jawa Timur. Validitas hasil penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data wawancara, dokumentasi, dan temuan analisis kuantitatif, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perumusan strategi serta rekomendasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan DLH.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Rasio Keuangan

Berdasarkan analisis rasio keuangan, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur (DLH) memiliki kinerja keuangan yang relatif baik dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini tercermin dari tingkat efektivitas realisasi anggaran yang relatif tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas PAD DLH Jatim Tahun 2020-2024					
Tahun	Target	Realisasi	Presentase		
2020	Rp 900.000.000	Rp 1.410.357.600	157%		
2021	Rp 900.000.000	Rp 1.123.917.600	125%		
2022	Rp 1.150.000.000	Rp 1.422.818.130	124%		
2023	Rp 1.150.000.000	Rp 1.489.790.813	130%		
2024	Rp 1.250.000.000	Rp 2.040.925.670	163%		

Sumber : Diolah Penulis, 2025.

Tingginya tingkat efektivitas tersebut mengindikasikan bahwa DLH memiliki kemampuan perencanaan anggaran yang memadai, di mana penetapan target anggaran telah disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan kebutuhan program kerja. Selain itu, capaian efektivitas yang tinggi juga mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan secara optimal sesuai dengan rencana kerja dan tujuan organisasi.

Dari sisi rasio efisiensi belanja, hasil analisis menunjukkan bahwa DLH Provinsi Jawa Timur mampu mengendalikan penggunaan anggaran dengan cukup baik, yang ditandai dengan realisasi belanja yang tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas PAD DLH Jatim Tahun 2020-2024					
Tahun	Target	Realisasi	Presentase		
2020	Rp 900.000.000	Rp 1.410.357.600	157%		
2021	Rp 900.000.000	Rp 1.123.917.600	125%		
2022	Rp 1.150.000.000	Rp 1.422.818.130	124%		
2023	Rp 1.150.000.000	Rp 1.489.790.813	130%		
2024	Rp 1.250.000.000	Rp 2.040.925.670	163%		

Sumber : Diolah Penulis, 2025.

Kondisi ini menunjukkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian (prudence) dalam pengelolaan keuangan serta berfungsinya mekanisme pengendalian internal dalam proses pelaksanaan anggaran. Namun demikian, tingkat efisiensi yang tinggi tidak dapat langsung diartikan sebagai kinerja yang sepenuhnya optimal. Efisiensi belanja perlu dianalisis secara lebih mendalam karena dalam beberapa kondisi, efisiensi dapat terjadi akibat belum

optimalnya pelaksanaan program, keterbatasan sumber daya manusia, atau penundaan kegiatan tertentu. Oleh karena itu, efisiensi belanja idealnya diimbangi dengan pencapaian output dan outcome program agar benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas kinerja, bukan sekadar penghematan anggaran.

Ditinjau dari rasio keserasian belanja, struktur belanja DLH Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian masih didominasi oleh belanja operasional dibandingkan dengan belanja modal.

Tabel 3. Keserasian Belanja Operasi.

Belanja Operasi DLH Jatim 2020-2025				
Tahun	Belanja Daerah	Realisasi Belanja Operasi		Presentase
2020	Rp 37.409.813.537	Rp	33.320.612.584	89%
2021	Rp 38.148.118.407	Rp	35.558.524.834	93%
2022	Rp 49.278.694.465	Rp	46.904.076.675	95%
2023	Rp 50.753.343.971	Rp	46.865.073.871	92%
2024	Rp 48.604.719.636	Rp	47.287.973.154	97%

Sumber : Diolah Penulis, 2025.

Proporsi pengeluaran untuk biaya operasional yang dominan menunjukkan tingginya kebutuhan dana rutin, seperti gaji pegawai dan biaya barang serta jasa yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Di sisi lain, proporsi belanja modal yang relatif rendah menunjukkan bahwa struktur anggaran tidak menekankan investasi jangka panjang di bidang lingkungan, yaitu pengembangan, pengadaan, atau perbaikan infrastruktur dan fasilitas lingkungan.

Tabel 4. Keserasian Belanja Modal.

Belanja Modal DLH Jatim tahun 2020-2024				
Tahun	Belanja Daerah	Realisasi Belanja Modal		Presentase
2020	Rp 37.409.813.537	Rp	4.089.200.953	11%
2021	Rp 38.148.118.407	Rp	2.589.593.573	7%
2022	Rp 49.278.694.465	Rp	2.374.617.790	5%
2023	Rp 50.753.343.971	Rp	3.888.270.100	8%
2024	Rp 48.604.719.636	Rp	1.316.746.482	3%

Sumber : Diolah Penulis, 2025.

Kondisi ini berpotensi membatasi kapasitas DLH dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka panjang, mengingat keberhasilan program lingkungan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai.

Selanjutnya, rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan adanya fluktuasi selama periode 2020–2024. Fluktuasi pertumbuhan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa

dukungan pendapatan terhadap pelaksanaan program lingkungan hidup belum bersifat stabil dan berkelanjutan.

Tabel 5. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Presentase
2019	Rp 1.250.000.000	
2020	Rp 1.410.357.600	13%
2021	Rp 1.123.917.600	-20%
2022	Rp 1.422.818.130	27%
2023	Rp 1.489.790.813	5%
2024	Rp 2.040.925.670	37%

Sumber : Diolah Penulis, 2025.

Ketidakstabilan ini disebabkan karena meskipun DLH bergantung pada hibah dari pemerintah daerah, kontribusi dari sumber pendapatan lain relatif sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan ruang fiskal DLH menjadi sempit, sehingga fleksibilitas dalam pengembangan dan perluasan program strategis di bidang lingkungan hidup menjadi terbatas. Ketergantungan pada dana transfer juga membuat pengelolaan keuangan DLH sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan anggaran daerah, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup.

Hasil Analisis SWOT

Analisis SWOT membantu mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang berdampak besar pada kinerja keuangan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (DLH). Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi strategis DLH dalam mengelola sumber daya keuangan guna mendukung pelaksanaan program lingkungan hidup.

Dari sisi kekuatan (strengths), DLH Provinsi Jawa Timur memiliki aparatur yang kompeten dan berpengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah. Aparatur tersebut telah memahami regulasi yang berlaku, mulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan keuangan dan evaluasi kinerja. Kompetensi aparatur ini menjadi faktor kunci dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, karena pemahaman terhadap regulasi dan prosedur mampu meminimalkan kesalahan administrasi serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan. Selain itu, DLH juga memperoleh dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah yang tercermin dalam keberlanjutan alokasi anggaran untuk program lingkungan hidup. Dukungan tersebut memberikan legitimasi dan kepastian bagi DLH dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta memperkuat posisi DLH dalam struktur organisasi pemerintah daerah.

Namun demikian, DLH juga menghadapi sejumlah kelemahan (*weaknesses*) yang berpotensi menghambat optimalisasi kinerja keuangan. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadi salah satu permasalahan utama, karena beban kerja yang tinggi tidak selalu sebanding dengan kapasitas aparatur yang tersedia. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan program, memperlambat proses administrasi, serta membatasi ruang inovasi dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, rendahnya proporsi belanja modal menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih lebih berfokus pada pembiayaan kegiatan rutin dibandingkan investasi jangka panjang. Rendahnya belanja modal membatasi kemampuan DLH dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan lingkungan hidup, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas layanan dan keberlanjutan program lingkungan.

Dari sisi peluang (*opportunities*), meningkatnya perhatian pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta terhadap isu lingkungan hidup memberikan ruang yang luas bagi DLH untuk mengembangkan berbagai bentuk kerja sama strategis. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan alternatif untuk mendukung program lingkungan hidup, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah daerah. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem pemerintahan membuka peluang bagi DLH untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Pemanfaatan teknologi dalam perencanaan, pelaporan, dan pemantauan kegiatan lingkungan hidup dapat membantu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses administrasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data.

Adapun ancaman (*threats*) yang dihadapi DLH Provinsi Jawa Timur antara lain meningkatnya kompleksitas dan intensitas permasalahan lingkungan hidup, seperti pencemaran, pengelolaan sampah, dan degradasi lingkungan. Permasalahan tersebut menuntut kebutuhan anggaran yang semakin besar, sementara kapasitas fiskal daerah relatif terbatas. Selain itu, adanya potensi perubahan kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah dapat memengaruhi besaran alokasi anggaran yang diterima DLH. Ketidakpastian kebijakan ini menuntut DLH untuk lebih adaptif dan inovatif dalam mengelola sumber daya keuangan yang tersedia agar tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan lingkungan hidup secara optimal meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.

Keterkaitan Analisis Rasio Keuangan dengan Analisis SWOT

Hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan DLH Provinsi Jawa Timur tergolong cukup baik dari sisi efektivitas dan efisiensi, namun masih menghadapi

permasalahan struktural berupa dominasi belanja operasional, rendahnya belanja modal, serta fluktuasi pertumbuhan pendapatan. Kondisi ini berkaitan erat dengan faktor-faktor internal dan eksternal yang teridentifikasi dalam analisis SWOT.

Tingkat efektivitas anggaran yang tinggi mencerminkan kekuatan internal DLH berupa kompetensi aparatur dan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Aparatur yang memahami regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan mampu menyusun perencanaan anggaran secara realistis dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja, sehingga target anggaran dapat direalisasikan secara optimal.

Sementara itu, efisiensi belanja yang relatif baik berkaitan dengan adanya sistem pengendalian internal yang berjalan cukup efektif. Namun, efisiensi tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya belanja modal, yang merupakan kelemahan internal DLH. Keterbatasan ini berpotensi menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan program dan menurunnya kualitas output, meskipun secara nominal realisasi belanja terlihat efisien.

Dominasi belanja operasional dan rendahnya belanja modal mencerminkan kelemahan struktural dalam pengalokasian anggaran. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya investasi jangka panjang di bidang lingkungan hidup, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberlanjutan kinerja DLH. Fluktuasi pertumbuhan pendapatan juga berkaitan dengan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer daerah, yang menjadi ancaman eksternal karena sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan pemerintah daerah.

Dengan demikian, analisis SWOT memberikan penjelasan kualitatif yang memperkuat temuan kuantitatif dari analisis rasio keuangan, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan strategi peningkatan kinerja keuangan DLH Provinsi Jawa Timur.

Perumusan Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Berbasis SWOT

Strategi SO diarahkan untuk mengoptimalkan kompetensi aparatur dan dukungan pemerintah daerah guna memanfaatkan peluang yang tersedia. DLH dapat meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memanfaatkan kemampuan aparatur dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Strategi ini diharapkan dapat membantu menambah sumber pendanaan alternatif, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer daerah dan mendukung peningkatan belanja modal. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan pemantauan lingkungan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi WO difokuskan pada upaya mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya belanja modal melalui pemanfaatan peluang kerja sama dan inovasi. DLH dapat memanfaatkan dukungan sektor swasta dan pihak ketiga untuk mendukung pembiayaan program lingkungan hidup yang bersifat investasi jangka panjang. Selain itu, penerapan digitalisasi sistem keuangan dan administrasi diharapkan dapat mengurangi beban kerja aparatur yang terbatas serta meningkatkan efisiensi proses perencanaan dan pelaporan. Strategi ini juga sejalan dengan hasil rasio efisiensi belanja, di mana efisiensi perlu diarahkan untuk peningkatan kualitas output, bukan sekadar penghematan anggaran.

Strategi ST di arahkan untuk memanfaatkan kompetensi aparatur dan dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman keterbatasan kapasitas fiskal dan perubahan kebijakan anggaran. DLH perlu memperkuat perencanaan anggaran berbasis kinerja dengan menetapkan prioritas program yang memiliki dampak lingkungan dan sosial yang tinggi. Dengan perencanaan yang lebih selektif dan berbasis hasil, DLH dapat menjaga tingkat efektivitas anggaran meskipun menghadapi tekanan fiskal. Strategi ini juga mendukung stabilitas kinerja keuangan di tengah fluktuasi pertumbuhan pendapatan.

Strategi WT merupakan strategi defensif yang difokuskan pada penataan internal untuk menghadapi keterbatasan sumber daya dan ancaman eksternal. DLH perlu melakukan evaluasi dan rasionalisasi belanja operasional guna menciptakan ruang fiskal bagi peningkatan belanja modal. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi penting untuk memastikan bahwa keterbatasan sumber daya manusia tidak semakin memperburuk dampak ancaman fiskal. Strategi ini bertujuan menjaga keberlanjutan kinerja keuangan DLH dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024 secara umum berada pada kategori cukup baik, yang tercermin dari tingkat efektivitas realisasi anggaran yang relatif tinggi serta kemampuan dalam mengendalikan penggunaan anggaran agar tidak melebihi pagu yang ditetapkan, meskipun masih terdapat permasalahan struktural berupa dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal dan fluktuasi pertumbuhan pendapatan yang menunjukkan keterbatasan investasi jangka panjang serta tingginya ketergantungan pada dana transfer pemerintah daerah; hasil analisis SWOT memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan adanya kekuatan berupa kompetensi aparatur dan dukungan kebijakan pemerintah daerah, di tengah kelemahan berupa keterbatasan sumber daya

manusia dan rendahnya belanja modal, serta peluang dari meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan hidup dan potensi kerja sama dengan sektor swasta yang dihadapkan pada ancaman keterbatasan kapasitas fiskal dan perubahan kebijakan anggaran, sehingga peningkatan kinerja keuangan DLH ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas belanja dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan lingkungan hidup melalui penerapan strategi berbasis SWOT yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abadi, M. D., Lailiyah, E. H., & Kartikasari, E. D. (2020). Analisis SWOT fintech syariah dalam menciptakan keuangan inklusif di Indonesia (studi kasus tiga bank syariah di Lamongan). *JESYA (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 178–188. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.298>
- Adhitya, I., & Christmastianto, W. (2017). Analisis SWOT implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 20(1), 133–144.
- Admaja, A., Anggraini, D., Larasati, M., Cahyanti, N. D., & Wasil, M. (2021). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung periode 2014–2018. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.26905/jrei.v2i2.7339>
- Aithan, I., Frinaldi, A., Putri, N. E., & Asnil. (2025). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok berdasarkan APBD tahun 2024. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Modern*, 9(2), 8–21.
- Cendra, C. (2025). Analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2021–2023. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 167–176. [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).22927](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).22927)
- Dewi, N. P. A., & Putra, I. N. W. A. (2022). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(1), 57–66. <https://doi.org/10.23887/jiah.v12i1.38945>
- Fareza Tanjung, J. (2025). *Analisis rasio keuangan daerah dalam penilaian kinerja keuangan Kabupaten Asahan tahun 2019–2023* [Undergraduate thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. IPDN Repository. <http://eprints.ipdn.ac.id/20579/>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Pengukuran kinerja keuangan daerah melalui analisis rasio APBD. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 321–334. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9019>
- Kurniawati, E., & Nugroho, R. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(3), 211–220. <https://doi.org/10.17977/um004v8i32021p211>
- Maulidah Narastri, L. M. (2024). *Analisis pengelolaan dan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna peningkatan perekonomian masyarakat desa ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019* [Undergraduate thesis].

- Pratiwi, D. A., & Handayani, N. (2020). Analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–15. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Rahmawati, E., & Yuliani, N. L. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio keuangan APBD. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 889–900. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.682>
- Saidah, S. L., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh pembiayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, dan belanja bantuan sosial terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2014–2023. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(3), 5391–5401.
- Saputri, O. B. (2021). Analisis SWOT transformasi digital transaksi keuangan pemerintah daerah dalam mendukung inklusi keuangan. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 17(3), 482–494. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Sari, S., & Rahmawati, D. (2021). Pengukuran kinerja keuangan sektor publik sebagai dasar akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6(2), 45–58.
- Setiawan, A., & Wulandari, S. (2023). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 144–156. <https://doi.org/10.29259/jep.v12i2.19345>
- Yuliani, M. R., & Purnamawati, I. G. A. (2025). Analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan di BPKPD Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 10(1), 276–286.
- Zulkarnain. (2020). *Kinerja keuangan pemerintah daerah: Pendekatan rasio keuangan dan analisis fiskal daerah*. Deepublish.